

Intisari

Penerimaan pajak dari sektor wajib pajak orang pribadi nonkaryawan di Indonesia saat ini belum optimal karena tingkat kepatuhan pajak sukarela yang masih cukup rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh keadilan distributif, keadilan prosedural, dan kesesuaian tingkat denda pajak pada kepatuhan pajak sukarela dengan mempertimbangkan peran mediasi kepercayaan terhadap otoritas pajak. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi pengaruh kompleksitas pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kepatuhan pajak sukarela. Pendekatan kuantitatif dengan desain survei digunakan dalam studi ini, melibatkan 396 responden wajib pajak orang pribadi nonkaryawan di seluruh Indonesia yang dikumpulkan melalui kuesioner daring dan dianalisis menggunakan metode PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan distributif, keadilan prosedural, dan kesesuaian tingkat denda pajak berkontribusi positif dalam meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Kepercayaan ini, pada gilirannya, memediasi secara parsial pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan pajak sukarela. Namun, kompleksitas pajak ditemukan memoderasi hubungan ini secara negatif, di mana semakin tinggi kompleksitas pajak, semakin lemah hubungan antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kepatuhan pajak sukarela. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan mengintegrasikan konsep kerangka kerja lereng licin dan teori beban kognitif untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak sukarela. Secara praktis, temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela wajib pajak orang pribadi nonkaryawan.

Kata kunci: wajib pajak orang pribadi nonkaryawan, kepatuhan pajak sukarela, kepercayaan terhadap otoritas pajak, keadilan distributif, keadilan prosedural, kesesuaian tingkat denda pajak, kompleksitas pajak, kerangka kerja lereng licin, teori beban kognitif, PLS-SEM.

Abstract

Tax revenue from the non-employee individual taxpayer sector in Indonesia is currently not optimal due to the relatively low level of voluntary tax compliance. This study aims to examine the influence of distributive justice, procedural justice, and the appropriateness of tax penalty levels on voluntary tax compliance, considering the mediating role of trust in tax authorities. Additionally, this research explores the moderating effect of tax complexity on the relationship between trust in tax authorities and voluntary tax compliance. A quantitative approach with a survey design was employed in this study, involving 396 non-employee individual taxpayers across Indonesia. Data were collected through an online questionnaire and analyzed using the PLS-SEM method. The findings reveal that distributive justice, procedural justice, and the appropriateness of tax penalty levels positively contribute to increasing taxpayers' trust in tax authorities. This trust, in turn, partially mediates the influence of these three variables on voluntary tax compliance. However, tax complexity was found to negatively moderate this relationship, where higher tax complexity weakens the link between trust in tax authorities and voluntary tax compliance. This study provides a theoretical contribution by integrating the slippery slope framework and cognitive load theory to better understand the factors influencing voluntary tax compliance. Practically, the findings are expected to serve as valuable input for tax authorities in designing more effective policies to enhance voluntary tax compliance among non-employee individual taxpayers.

Keywords: non-employee individual taxpayers, voluntary tax compliance, trust in tax authorities, distributive justice, procedural justice, appropriateness of tax penalty levels, tax complexity, slippery slope framework, cognitive load theory, PLS-SEM.